



ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Iklimah Nur Sholeha

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Ersi Sisdianto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jalan Letnan Kolonel H. Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung

Korespondensi penulis: nuriklima429@gmail.com

Abstract: *This study investigates the role of Sharia accounting practices in improving the transparency of financial statements within the regional government of Bandar Lampung, employing a qualitative method with a literature study approach. The research is motivated by the need to align financial reporting processes with ethical and Sharia principles in public sector governance. Data were gathered through an extensive review of relevant books, journals, and official reports on Sharia accounting and its applications in public administration. The findings suggest that Sharia accounting principles enhance the transparency and accountability of financial management by incorporating Islamic ethical values into reporting standards. This study underscores the importance of adopting Sharia accounting as a model to achieve better transparency and governance in regional financial management.*

Keywords: *Sharia Accounting, Transparency, Financial Management*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran praktik akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pada pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi pustaka. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan proses pelaporan keuangan dengan prinsip etika dan syariah dalam tata kelola sektor publik. Data dikumpulkan melalui tinjauan mendalam terhadap buku, jurnal, dan laporan resmi yang relevan tentang akuntansi syariah dan aplikasinya dalam administrasi publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syariah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam ke dalam standar pelaporan. Penelitian ini menekankan pentingnya adopsi akuntansi syariah sebagai model untuk mencapai transparansi dan tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: *Akuntansi Syariah, Transparansi, Tata Kelola Keuangan*

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan publik telah menjadi isu yang semakin relevan, terutama di tengah tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi. Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pusat pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang tidak hanya akurat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika, termasuk prinsip-prinsip Islam. Transparansi dalam laporan keuangan daerah diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik sesuai dengan prinsip good governance dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan masyarakat dan infrastruktur. Sistem keuangan daerah di kota ini didasarkan

pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dirancang untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan. Sumber utama pendapatan daerah Bandar Lampung meliputi pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi, transfer dana dari pemerintah pusat, serta hibah atau bantuan dana dari berbagai pihak. Dana-dana tersebut digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, dan fasilitas umum lainnya. Namun, seperti di banyak daerah lain, pengelolaan keuangan daerah sering menghadapi tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam pelaporan keuangan. Ada kebutuhan yang terus meningkat untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran digunakan secara efektif dan sesuai prioritas.

Transparansi laporan keuangan daerah merupakan elemen penting untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran publik. Dalam pandangan syariah, transparansi tidak hanya berarti memberikan informasi yang jelas dan akurat, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan dengan prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan. Prinsip syariah menekankan bahwa setiap bentuk pengelolaan keuangan harus dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat. Hal ini berarti bahwa penggunaan anggaran harus diprioritaskan untuk kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, serta dilakukan dengan efisiensi dan tanpa pemborosan. Melalui transparansi berbasis syariah, laporan keuangan daerah dapat menjadi alat untuk menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang jelas terhadap informasi keuangan. Dengan cara ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat hubungan antara pengelola anggaran dan penerima manfaatnya (Wijaya, 2022).

Akuntansi syariah memiliki pendekatan yang lebih etis dibandingkan sistem konvensional, dengan menekankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap proses pelaporan keuangan. Dalam konteks laporan keuangan daerah, penerapan akuntansi syariah menjadi relevan untuk memastikan bahwa Akuntansi syariah memastikan bahwa laporan tidak hanya mencatat transaksi keuangan, tetapi juga dampak sosial dan keadilan dari penggunaan dana tersebut. Anggaran publik harus dialokasikan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada bias atau ketidakadilan. Dengan pelaporan yang sesuai prinsip Islam, pemerintah dapat menciptakan rasa percaya yang lebih tinggi di masyarakat, terutama di kota seperti Bandar Lampung yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berbagai kebijakan dan regulasi telah mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, termasuk dalam kerangka prinsip syariah. Regulasi ini mencakup aturan nasional yang mengatur tentang keuangan negara dan daerah, serta inisiatif lokal yang relevan. Aturan-aturan yang ada menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Misalnya, regulasi nasional menuntut pemerintah daerah untuk mengungkapkan secara jelas sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran dalam dokumen anggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, dan setiap penyimpangan dapat diaudit dengan mudah. Standar akuntansi berbasis syariah memberikan panduan tentang bagaimana mencatat transaksi keuangan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, seperti penghapusan unsur riba dan gharar. Standar ini dapat diadaptasi dalam laporan keuangan daerah untuk pengelolaan dana-dana khusus seperti zakat, wakaf, atau dana hibah yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.

Di tingkat lokal, pemerintah Bandar Lampung dapat mengadopsi kebijakan yang mendorong transparansi berbasis syariah. Misalnya, melalui kerja sama dengan lembaga

keuangan syariah dalam pengelolaan dana daerah atau penyusunan aturan khusus tentang penggunaan dana publik yang sejalan dengan prinsip syariah. Penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi juga menjadi langkah penting. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana daerah secara real-time, yang selaras dengan prinsip akuntansi syariah dalam memberikan informasi secara terbuka dan jujur. Penelitian terdahulu mengenai akuntansi syariah umumnya lebih banyak berfokus pada lembaga keuangan Islam seperti bank syariah atau koperasi syariah. Namun, studi tentang penerapan akuntansi syariah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah masih sangat terbatas. Gap ini menunjukkan kurangnya literatur yang secara spesifik menganalisis potensi dan tantangan dalam penerapan prinsip akuntansi syariah di sektor publik, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjawab kebutuhan akan model pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan berlandaskan prinsip syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik akuntansi syariah dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Bandar Lampung guna meningkatkan transparansi laporan keuangan. Dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan akuntansi syariah di sektor publik sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengadopsi prinsip-prinsip syariah.

KAJIAN TEORI

a. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang tidak hanya relevan dan andal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral Islam, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam akuntansi syariah, transaksi yang diatur mencakup aspek-aspek keuangan yang tidak melibatkan unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara halal dan mendukung tujuan kemaslahatan umat (Zulfa et al., 2023).

- Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

- 1) **Transparansi (Al-Idhar)**
Informasi keuangan harus jelas, dapat diakses, dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
- 2) **Keadilan (Al-Adl)**
Semua transaksi harus mencerminkan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.
- 3) **Amanah (Trust)**
Akuntan dan pengelola keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang telah dipercayakan.
- 4) **Kesederhanaan (Al-Muyassar)**
Proses pencatatan dan pelaporan tidak boleh terlalu rumit, tetapi tetap memadai untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
- 5) **Larangan Riba**
Tidak ada unsur bunga dalam transaksi yang dicatat, karena riba dianggap merugikan dan bertentangan dengan nilai Islam.
- 6) **Penghapusan Gharar dan Maysir**

Semua transaksi harus bebas dari ketidakjelasan dan spekulasi yang berlebihan.

7) Akuntabilitas (Mas'uliyah)

Akuntansi syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal tetapi juga kepada Allah SWT dan masyarakat luas.

- **Tujuan Akuntansi Syariah**

- a) Memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan keuangan sesuai dengan aturan Islam.
- b) Mencatat transaksi dengan integritas tinggi sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT dan seluruh pemangku kepentingan.
- c) Mendukung distribusi kekayaan yang adil dan pemerataan kesejahteraan.
- d) Memberikan informasi keuangan yang transparan untuk membangun kepercayaan antara pihak yang terlibat.
- e) Mendukung tercapainya tujuan utama syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Tabel 1

Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Aspek	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Prinsip Dasar	Berdasarkan nilai-nilai Islam dan Al-Qur'an.	Berdasarkan prinsip ekonomi dan hukum umum.
Tujuan	Akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat.	Memberikan informasi keuangan kepada pemilik modal.
Unsur Larangan	Melarang riba, gharar, dan maysir.	Tidak ada larangan terkait riba atau spekulasi.
Pendekatan Akuntansi	Fokus pada keadilan dan keseimbangan sosial.	Fokus pada keuntungan dan efisiensi ekonomi.
Laporan Tambahan	Melibatkan laporan sosial atau zakat.	Laporan keuangan konvensional seperti neraca dan laba rugi.

- Penerapan Akuntansi Syariah adalah :

(1) Perbankan Syariah

Digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dalam lembaga keuangan yang beroperasi tanpa riba.

(2) Zakat dan Wakaf

Akuntansi syariah mengatur pelaporan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan syariah.

(3) Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menerapkan sistem akuntansi syariah untuk pengelolaan dana dalam skala kecil dengan fokus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

(4) Pemerintah Daerah Berbasis Syariah

Dalam konteks daerah tertentu, akuntansi syariah diterapkan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

- Manfaat Akuntansi Syariah
 - (a) Dengan laporan yang transparan dan adil, kepercayaan masyarakat terhadap institusi meningkat.
 - (b) Larangan terhadap riba dan spekulasi membantu mencegah ketidakstabilan finansial.
 - (c) Akuntansi syariah memenuhi kebutuhan umat Islam untuk mempraktikkan nilai agama dalam kehidupan ekonomi.
 - (d) Melibatkan tanggung jawab sosial dalam setiap laporan keuangan yang dibuat.

Akuntansi syariah diterapkan di berbagai sektor, seperti perbankan syariah, pengelolaan zakat dan wakaf, lembaga keuangan mikro syariah, serta pemerintah daerah berbasis syariah. Penerapan ini memberikan manfaat yang signifikan, termasuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mencegah ketidakstabilan finansial, dan memenuhi kebutuhan umat Islam untuk mengintegrasikan nilai agama dalam kehidupan ekonomi. Dengan pendekatan yang holistik, akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan spiritual, menjadikannya instrumen penting dalam mencapai keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi.

b. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks keuangan, transparansi mengacu pada penyediaan informasi yang jelas, lengkap, dan dapat dipahami oleh masyarakat atau pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan mereka untuk memahami kinerja, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya secara efektif (Nurhadianto & Khamisah, 2019). Transparansi bertujuan menciptakan kepercayaan, akuntabilitas, dan keadilan dalam berbagai aspek pengelolaan, baik dalam sektor publik, swasta, maupun organisasi sosial.

- Prinsip-Prinsip Transparansi adalah

- 1) Keterbukaan Informasi
Informasi harus disampaikan secara terbuka tanpa menyembunyikan fakta yang dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan.
- 2) Aksesibilitas
Informasi harus mudah diakses oleh pihak yang berhak mengetahuinya, baik melalui media digital, laporan cetak, maupun forum resmi.
- 3) Akurasi
Data dan informasi yang disampaikan harus benar, tepat waktu, dan sesuai dengan fakta.
- 4) Konsistensi
Penyajian informasi harus konsisten dari waktu ke waktu sehingga memungkinkan perbandingan dan analisis.
- 5) Pertanggungjawaban
Transparansi harus didukung oleh mekanisme yang memungkinkan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan jika diperlukan.

Dalam pengelolaan keuangan, transparansi memainkan peran penting untuk:

- a) Mencegah Korupsi

Keterbukaan mengurangi peluang penyalahgunaan dana karena setiap transaksi dapat diaudit.

b) Meningkatkan Kepercayaan Publik

Laporan yang transparan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik atau investasi.

c) Akuntabilitas

Transparansi memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan dan tujuan organisasi.

d) Mendukung Pengambilan Keputusan yang Tepat

Informasi yang jelas dan relevan membantu pihak berkepentingan dalam membuat keputusan yang informasional.

Dalam sektor publik, seperti pemerintah daerah, transparansi menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan. Contoh penerapan transparansi meliputi:

- (1) Pemerintah menyediakan dokumen anggaran secara terbuka untuk publik melalui situs resmi atau laporan tahunan.
- (2) Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran atau pemantauan pelaksanaannya.
- (3) Menyediakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh lembaga independen untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap regulasi.

- **Manfaat Transparansi adalah :**

- (a) Dengan transparansi, masyarakat atau pemangku kepentingan merasa lebih yakin terhadap pengelolaan organisasi atau lembaga.
- (b) Keterbukaan mendorong pengelola untuk bekerja secara efisien karena mereka tahu bahwa kinerja mereka akan diawasi.
- (c) Transparansi memudahkan identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas keputusan atau hasil tertentu.
- (d) Organisasi yang transparan cenderung memiliki reputasi yang baik karena dianggap dapat dipercaya dan profesional.

Dalam akuntansi syariah, transparansi adalah bagian dari prinsip amanah (kepercayaan) dan adil (keadilan). Transparansi dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan:

1. Bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir.
2. Dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Mendukung kesejahteraan bersama transparansi memastikan dana digunakan secara halal dan mendukung kemaslahatan umat.

Dengan demikian, transparansi tidak hanya relevan dalam konteks tata kelola modern, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadikan transparansi sebagai fondasi penting dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, akuntabel, dan terpercaya. Dalam Islam, transparansi mengarah pada prinsip amanah (kepercayaan) dan keadilan, yang memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan dengan integritas, bebas dari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah, masyarakat, dan pihak berkepentingan. Dengan

demikian, transparansi mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang halal, mendukung kemaslahatan umat, dan menciptakan sistem keuangan yang lebih baik dan lebih terpercaya.

c. Tata Kelola Keuangan

Tata kelola keuangan adalah serangkaian prinsip, kebijakan, proses, dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola, mengontrol, dan mengawasi pengelolaan sumber daya keuangan suatu organisasi atau entitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keuangan dikelola secara efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tata kelola keuangan yang baik mencakup manajemen keuangan yang efektif, pelaporan keuangan yang akurat, dan pengawasan yang memadai untuk menghindari penyalahgunaan atau pemborosan sumber daya (Pratiwi et al., 2024). **Prinsip-prinsip tata kelola keuangan adalah :**

- 1) **Transparansi**
Informasi keuangan harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
- 2) **Akuntabilitas**
Pengelola keuangan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan keuangan.
- 3) **Efisiensi**
Sumber daya keuangan harus digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi dengan biaya minimal.
- 4) **Kepatuhan**
Semua kebijakan dan proses harus mematuhi peraturan hukum dan standar keuangan yang berlaku.
- 5) **Partisipasi**
Melibatkan semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, dalam proses pengambilan keputusan terkait keuangan.
- 6) **Keberlanjutan**
Pengelolaan keuangan harus mendukung keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang (Mutthaqin et al., 2023).

Komponen utama tata kelola keuangan adalah :

- a) **Perencanaan Keuangan**
Menyusun anggaran yang mencerminkan prioritas dan tujuan organisasi.
- b) **Pengelolaan Dana**
Mengelola pemasukan dan pengeluaran untuk memastikan likuiditas dan stabilitas keuangan.
- c) **Pelaporan Keuangan**
Menyusun laporan keuangan secara berkala untuk mencatat penggunaan dana dan kinerja keuangan organisasi.
- d) **Pengendalian Internal**
Membuat sistem kontrol yang mencegah kesalahan atau penyalahgunaan keuangan, seperti audit internal dan pemeriksaan berkala.
- e) **Audit dan Evaluasi**

Memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan kebijakan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Dalam sektor publik, tata kelola keuangan memainkan peran penting dalam pengelolaan anggaran negara atau daerah, termasuk:

- (1) Anggaran publik harus dialokasikan secara efisien untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah harus menyampaikan laporan keuangan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik.
- (3) Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan dalam mengaudit laporan keuangan pemerintah.
- (4) Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran untuk memastikan kebijakan keuangan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Tata kelola keuangan berbasis syariah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Beberapa ciri utamanya meliputi:

- (a) Pengelolaan keuangan harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).
- (b) Tata kelola keuangan syariah mencakup pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.
- (c) Setiap proses pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan harus mencerminkan nilai keadilan dan keterbukaan sesuai syariat Islam.
- (d) Keuangan syariah menekankan pentingnya menggunakan dana untuk kegiatan yang mendukung kemaslahatan umat.

Manfaat tata kelola keuangan yang baik

1. Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas
Pengelolaan yang baik memastikan sumber daya keuangan digunakan dengan cara yang paling efektif.
2. Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder
Tata kelola yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, investor, atau donor.
3. Mengurangi Risiko Keuangan
Sistem kontrol yang kuat membantu mengurangi risiko penyelewengan atau kegagalan keuangan.
4. Mendukung Keberlanjutan
Tata kelola yang baik membantu organisasi atau entitas bertahan dalam jangka panjang dengan pengelolaan keuangan yang stabil (Putri Nuralimah et al., 2024)

Dalam sektor publik, tata kelola keuangan memiliki peran yang sangat krusial, terutama dalam mengelola anggaran negara atau daerah, dengan memastikan anggaran dialokasikan secara efisien dan dilaporkan secara terbuka agar dapat diawasi oleh masyarakat. Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga berperan penting dalam memastikan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah.

Selain itu, tata kelola keuangan berbasis syariah memberikan perspektif tambahan, yaitu integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan, yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan penghindaran praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, dan maysir. Tata kelola keuangan syariah juga mendorong penggunaan dana untuk kegiatan yang mendukung kemaslahatan umat.

Manfaat dari tata kelola keuangan yang baik sangat besar, antara lain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kepercayaan stakeholder, mengurangi risiko keuangan, dan mendukung keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan tata kelola keuangan yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan keberhasilan organisasi, baik dalam sektor publik maupun swasta, termasuk yang berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka adalah jenis penelitian yang menggunakan berbagai sumber literatur sebagai data utama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan, tetapi memanfaatkan dokumen, artikel ilmiah, buku, laporan resmi, dan sumber tertulis lainnya untuk menganalisis suatu fenomena (Kartono, 2018).

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka merupakan jenis penelitian yang sangat bergantung pada sumber-sumber literatur sebagai data utama untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik atau fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih mengutamakan pengumpulan data melalui eksperimen atau survei langsung di lapangan. Dalam penelitian dengan pendekatan studi pustaka, peneliti lebih fokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, jurnal, regulasi, dokumen kebijakan, dan berbagai literatur lainnya yang tersedia secara tertulis.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih komprehensif mengenai berbagai teori, konsep, atau fenomena yang telah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, serta mengidentifikasi pola-pola yang relevan dengan topik yang sedang dianalisis. Meskipun penelitian ini tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden atau objek penelitian di lapangan, namun kekuatan utama dari pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk menyaring dan mengolah informasi yang tersedia dalam berbagai bentuk literatur untuk merumuskan kesimpulan yang mendalam dan informatif.

Selain itu, pendekatan studi pustaka juga sangat bermanfaat dalam menghasilkan kerangka teori yang kokoh, serta dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih tajam. Dengan memanfaatkan literatur yang ada, peneliti dapat mengeksplorasi lebih jauh permasalahan yang ada dalam kajian akademik atau profesional, serta melihat bagaimana fenomena tersebut telah dibahas dalam berbagai disiplin ilmu. Proses ini tidak hanya memperkaya wawasan peneliti, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih lengkap dan holistik mengenai topik yang diteliti.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka juga memiliki keuntungan dalam hal efisiensi waktu dan biaya, karena tidak memerlukan perjalanan lapangan atau pengumpulan data primer yang sering kali memerlukan biaya yang cukup besar. Dengan demikian, penelitian ini cocok untuk situasi di mana pengumpulan data langsung tidak memungkinkan, atau ketika penelitian bertujuan untuk memberikan dasar teori yang kuat sebelum melakukan penelitian lebih lanjut di lapangan. Namun, meskipun demikian, penting bagi peneliti untuk selalu memastikan bahwa sumber literatur yang digunakan adalah valid dan kredibel, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transparansi keuangan daerah adalah elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran

publik. Dalam kerangka syariah, transparansi menjadi wujud amanah dan keadilan yang harus diutamakan. Berikut adalah pembahasan mengenai regulasi dan kebijakan yang mendukung transparansi keuangan berbasis syariah di tingkat daerah, dengan fokus pada Kota Bandar Lampung.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang ini mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, termasuk keuangan daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa poin penting terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan meliputi:

1. Setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Laporan keuangan daerah harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Masyarakat diberi ruang untuk mengawasi dan memberikan masukan terkait pengelolaan anggaran daerah (Saputra et al., 2020).

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya, termasuk keuangan, secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pengawasan keuangan daerah. Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam regulasi ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta pengelolaan keuangan yang bebas dari praktik yang tidak adil. Aspek ini relevan dengan nilai-nilai Islam, yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab moral dalam mengelola dana publik (Fadhilah et al., 2024).

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengadopsi sejumlah kebijakan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini meliputi penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, seperti sistem informasi keuangan yang mempermudah akses terhadap data keuangan dan proses pelaporan yang lebih cepat. Selain itu, transparansi diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan secara terbuka, baik melalui media cetak maupun elektronik. Upaya ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran publik secara langsung. Pemerintah daerah juga mengintegrasikan teknologi dalam perencanaan anggaran dan audit untuk mengurangi risiko penyimpangan. Dalam konteks syariah, kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi inti dari tata kelola keuangan Islam. Penggunaan teknologi modern dapat mendukung pelaksanaan nilai-nilai ini dengan lebih efektif.

Lembaga pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Di tingkat nasional, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan aturan dan prinsip keadilan. Di tingkat daerah, Inspektorat berfungsi sebagai lembaga pengawasan internal yang memantau pelaksanaan kebijakan keuangan daerah. Inspektorat juga membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan, sehingga pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih profesional dan sesuai prinsip syariah. Peran institusi ini sangat penting dalam memastikan bahwa praktik-praktik keuangan daerah selaras dengan nilai-nilai syariah, termasuk memastikan bahwa tidak ada unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti riba atau penggunaan anggaran untuk tujuan yang tidak sesuai.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung penerapan prinsip syariah dalam berbagai sektor, termasuk tata kelola keuangan daerah. Salah satu inisiatif penting adalah mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan syariah. Melalui kerjasama ini, dana publik seperti hibah, zakat, dan wakaf dapat dikelola dengan lebih transparan dan sesuai syariah. Di Bandar Lampung, kebijakan ini dapat diperkuat dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam pengelolaan anggaran daerah, sehingga tidak hanya menjamin transparansi, tetapi juga membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Laporan keuangan daerah Bandar Lampung umumnya berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan yang diatur secara nasional. Namun, dalam beberapa aspek, upaya integrasi prinsip-prinsip syariah sudah mulai diterapkan, terutama pada pengelolaan dana tertentu seperti hibah dan zakat. Meskipun pelaporan dana publik diatur oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas, integrasi unsur syariah dalam pelaporan belum sepenuhnya terwujud secara konsisten. Prinsip syariah yang relevan dalam laporan keuangan meliputi keadilan, kejujuran, dan penghindaran dari praktik yang tidak sesuai, seperti riba. Dalam konteks Bandar Lampung, identifikasi apakah transaksi dan pelaporan mematuhi nilai-nilai ini merupakan langkah penting dalam menilai tingkat penerapan akuntansi berbasis syariah.

Transparansi dalam pengelolaan dana zakat, wakaf, dan hibah berbasis syariah menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan berbasis Islam. Dalam laporan keuangan daerah, pengelolaan dana ini mencakup beberapa poin penting:

a. Pelaporan Dana Zakat dan Wakaf

Pemerintah daerah sering kali bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah atau Badan Amil Zakat Nasional untuk mengelola dana zakat. Laporan yang transparan mencakup jumlah dana yang dikumpulkan, alokasi penggunaannya, dan dampak sosial yang dihasilkan. Namun, ada tantangan untuk memastikan bahwa pelaporan ini benar-benar terintegrasi ke dalam laporan keuangan daerah secara menyeluruh.

b. Dana Hibah Berbasis Syariah

Dana hibah sering kali diberikan untuk mendukung kegiatan sosial atau keagamaan, yang seharusnya dikelola sesuai prinsip keadilan dan kemanfaatan. Transparansi dalam pelaporan hibah ini melibatkan detail penerima manfaat, alokasi dana, dan hasil yang dicapai. Sebagian besar pelaporan dana ini telah memenuhi prinsip transparansi administratif, tetapi penekanan pada nilai-nilai syariah seperti keadilan distributif dan tanggung jawab sosial perlu terus ditingkatkan (Armah & Firdaus, 2024).

Laporan keuangan daerah sudah mencakup banyak elemen yang mendekati prinsip syariah, seperti:

1) Keterbukaan dalam Pelaporan

Data keuangan yang disediakan oleh pemerintah daerah memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran. Prinsip ini mendukung transparansi, salah satu elemen penting dalam syariah.

2) Akuntabilitas

Proses audit oleh lembaga pengawasan eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar nasional dan memenuhi tanggung jawab publik.

Namun, ada beberapa area yang masih perlu ditingkatkan, antara lain:

a) Integrasi Nilai Syariah dalam Kebijakan Keuangan:

Penyusunan laporan keuangan dapat lebih mencerminkan nilai-nilai syariah dengan menekankan distribusi yang adil dan pelaporan rinci atas dana sosial seperti zakat dan wakaf.

b) Penghapusan Praktik Non-syariah:

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa transaksi keuangan, terutama yang melibatkan utang, tidak melibatkan riba atau elemen yang bertentangan dengan syariah.

Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, memainkan peran penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah berbasis syariah. Di Bandar Lampung, peran mereka mencakup:

(1) Penyimpanan dan Pengelolaan Dana Publik

Bank syariah dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyimpan dana publik, terutama dana sosial seperti zakat dan wakaf. Sistem pengelolaan yang bebas dari riba memastikan keselarasan dengan prinsip syariah.

(2) Pendanaan Berbasis Syariah

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan produk pembiayaan syariah, seperti sukuk daerah, untuk mendanai proyek infrastruktur atau program sosial. Pendekatan ini tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat.

(3) Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada pemerintah daerah mengenai tata kelola keuangan berbasis syariah. Hal ini mencakup pelatihan untuk memahami konsep-konsep seperti akad, mudharabah, dan wakalah dalam konteks keuangan publik (Maharani & Khasanah, 2021).

Potensi manfaat bagi Pemerintah Daerah Bandar Lampung

(a) Meningkatkan Kepercayaan Publik

Penerapan transparansi berbasis syariah akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan pelaporan yang jujur dan terbuka, pemerintah dapat menunjukkan komitmen pada prinsip keadilan dan amanah.

(b) Menciptakan Budaya Akuntabilitas Islami

Implementasi nilai-nilai syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, akan mendorong budaya akuntabilitas yang selaras dengan ajaran Islam, menciptakan tata kelola yang lebih bermartabat.

(c) Optimalisasi Alokasi Anggaran

Prinsip syariah menekankan keadilan dalam distribusi sumber daya. Ini memungkinkan anggaran diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok rentan, sehingga manfaatnya lebih terasa.

(d) Indikator Keberhasilan Transparansi

Keberhasilan dapat diukur melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan, kepuasan publik terhadap penggunaan anggaran, dan audit independen yang menunjukkan keselarasan dengan prinsip syariah (Alya, 2024).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah dalam transparansi laporan keuangan daerah di Bandar Lampung memiliki potensi besar untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran,

transparansi, dan pengelolaan yang bertanggung jawab, berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih baik dan sesuai dengan tuntunan Islam. Penerapan prinsip syariah tidak hanya berfokus pada pengelolaan dana umum, tetapi juga pada pengelolaan dana sosial yang mencakup zakat, wakaf, dan hibah berbasis syariah yang menjadi bagian penting dalam tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, meskipun terdapat potensi besar, implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah masih menghadapi tantangan dalam penerapannya secara menyeluruh. Salah satunya adalah penguatan dalam mekanisme pelaporan dana sosial yang berbasis syariah, di mana sistem pelaporan dan pencatatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah perlu dikembangkan lebih lanjut. Pemerintah daerah, dalam hal ini Bandar Lampung, diharapkan untuk memperkuat kerjasama dengan lembaga keuangan syariah agar tercipta sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan syariah, terutama dalam hal pengelolaan zakat, wakaf, dan hibah.

Lebih lanjut, peningkatan literasi keuangan berbasis syariah bagi pejabat daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi akuntansi syariah di tingkat daerah. Pendidikan dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam akuntansi dan pengelolaan keuangan harus diperhatikan agar seluruh pihak yang terlibat dapat memahami dan melaksanakan kebijakan keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang lebih efisien dan produktif, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan dana yang ada bermanfaat untuk kepentingan umat.

Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah penggunaan pendekatan studi pustaka yang lebih bersifat konseptual, tanpa melibatkan data empiris yang bisa menggambarkan kondisi nyata penerapan akuntansi syariah di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian empiris yang melibatkan studi kasus di lapangan sangat diperlukan di masa depan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian mendatang juga dapat berfokus pada pengaruh penerapan akuntansi syariah terhadap efisiensi anggaran daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, guna memberikan masukan yang lebih strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya, A. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Lazismu Kota Palopo Dalam Perspektif Psak 109. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonom*, 15(1), 37–48.
- Armah, S., & Firdaus, R. (2024). Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 62–69.
- Fadhilah, Suci, S., Waluyo, B., & Syafrida, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Akuntansi Wakaf: Kajian terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan oleh Yayasan Al Ihsan Permata Depok Depok. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*, 2(1), 233–248.
- Kartono, K. (2018). *Pengantar Metodologi Riset Social*.
- Maharani, A. M., & Khasanah, U. (2021). Implementasi Sistem Akuntansi Syariah Dalam Praktik Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 3(1), 82–89. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v3i1.2223>

- Mutthaqin, S., Adha, R., & Nurlaila. (2023). Dampak Penerapan Akuntansi Syariah terhadap Nilai Perusahaan dengan Perkembangan Akuntansi Syariah Saat Ini. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 1177–1217.
- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 2(2), 70. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.453>
- Pratiwi, L. P., Sisdianto, E., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, K. B. (2024). Pelaporan Dana Non Halal Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung Berdasarkan Psak No . 109 Pelaporan Dana Non Halal Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung Berdasarkan Psak No . 109. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4), 513–532.
- Putri Nuralimah, S., Fitriyani, M., Nurul Na, M., Syari, A., & Kudus, I. (2024). Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Baznas Kudus. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2.
- Saputra, A. W., Suwandi, M., & Suhartono. (2020). Akuntabilitas, Transparansi, Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Etika Sebagai Variabel Moderasi. *Isafir: Islamic Accounting and FInance Review*, 1(2), 40–55. www.kemenkeu.go.id
- Wijaya, S. (2022). Analisa Penerapan Yang Efektif Atas Sistem Teknologi Informasi Akuntansi Pada Koperasi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 13(1), 34–49.
- Zulfa, N., Millah, N. N., Nuratin, N., & Novitasari, K. (2023). Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 79–94. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>